

ABSTRAK

Richkymen Martua Yosua 160111100186. Program Studi Ilmu Hukum. Dengan latar belakang dalam penelitian ini karena permasalahan yang dihadapi dalam pengisian kekosongan jabatan yang ada di pemerintahan daerah khususnya jabatan Wakil Kepala Daerah, maka dari itu rumusan masalah yang saya ambil Bagaimana sejarah perjalanan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah di Indonesia? Dan bagaimana mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa metode hukum normatif yang mana dalam penelitian hukum normatif yakni menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif dan menggunakan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis/sejarah (*historical approach*).

Hasil analisis dalam penelitian ini pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah, hendaknya legislatif membuat aturan yang lebih tegas terhadap partai politik agar secepat mungkin mengusulkan dan mengajukan calon wakil kepala daerah apabila terdapat kekosongan jabatan, sehingga kepala pemerintahan daerah nantinya akan lebih mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

ABSTRACT

Richkymen Martua Joshua 160111100186. Law Study Program. With the background in this research because of the problems faced in filling vacancies in local government, especially the position of Deputy Regional Head, therefore the formulation of the problem I take What is the history of the journey of filling the vacancy of the position of deputy regional head in Indonesia? And how is the mechanism for filling the vacancy of the position of deputy regional head based on Law Number 9 of 2015.

The method used in this study is in the form of normative legal methods which in normative legal research are studying positive legal provisions and using research. namely the statute approach and the historical approach.

The results of the analysis in this study fill the vacancy of the position of deputy regional head, the legislature should make stricter rules against political parties so that as soon as possible to propose and submit candidates for deputy regional heads if there is a vacancy in office, so that the head of regional government will later be better able to carry out his duties and functions properly.

Preface : Vacancy of Office, Local Government

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	4
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	4
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	5
1.5 KEASLIAN.....	6
1.6 METODE PENELITIAN.....	12
1.6.1 Jenis Penelitian.....	12
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	13
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	13
1.6.4 Teknik Penggumpulan Bahan Hukum.....	14
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	14
1.7 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II.....	17
2.1 Teori jabatan dalam pengisian Wakil Kepala Daerah	17
2.2 Teori Pemerintahan Daerah.....	20
2.3 Teori Kepastian Hukum	24
2.4 Konsep Pengisian Jabatan	26
BAB II.....	34
3.1 Sejarah Perjalanan Pengisian Kekosongan Jabatan Dalam Undang-Undang dan Perundang-Undangan.....	34
3.2 Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.....	44
BAB IV.....	53
4.1. Kesimpulan.....	53
4.2. Saran.....	56